

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Ruang Publik Jurgen Habermas

Lahir di Dusseldorf pada tahun 1929, Habermas menjadi dewasa di Jerman pasca perang. Habermas menyelesaikan disertasinya pada tahun 1954 di Universitas Bonn, menulis tentang konflik antara yang absolut dan sejarah dalam pemikiran Schelling. Dia pertama kali mendapat perhatian publik yang serius, setidaknya di Jerman, dengan publikasi 1962 tentang habilitasinya, *Strukturwandel der Öffentlichkeit (Structural Transformation of the Public Sphere; English ed., 1989)*, sebuah sejarah sosial terperinci dari perkembangan ruang publik berjus dari asal-usulnya di abad 18, hingga transformasinya melalui pengaruh media massa yang digerakkan oleh modal (Rizqian, 2023)

Pemikiran Jürgen Habermas dipengaruhi oleh beberapa tokoh dan aliran pemikiran sepanjang sejarah. Beberapa pengaruh utama dalam pemikirannya adalah: Pertama, Max Weber. Habermas dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber, seorang sosiolog dan filsuf terkenal, terutama dalam hal analisis tentang peran rasionalitas dalam kehidupan sosial. Weber mengembangkan konsep rasionalitas tindakan dan rasionalitas nilai yang mempengaruhi pemahaman Habermas tentang rasionalitas komunikatif dalam ruang publik. (Moh. Khoirul Fatih, 2021).

Bagi Habermas, rasionalitas tidak semata-mata terkait dengan logika instrumental atau efisiensi teknis sebagaimana dijelaskan dalam rasionalitas modern ala Weber. Ia membedakan antara rasionalitas instrumental (yang

berorientasi pada hasil dan kontrol) dan rasionalitas komunikatif (*communicative rationality*), yaitu bentuk rasionalitas yang muncul melalui proses komunikasi yang bertujuan saling memahami.

Rasionalitas komunikatif adalah rasionalitas yang tidak didasarkan pada kekuasaan, paksaan, atau manipulasi, melainkan pada argumen yang dapat diterima secara intersubjektif oleh semua pihak yang terlibat dalam percakapan. Dalam konteks ruang publik, rasionalitas ini menjadi fondasi utama: warga negara dianggap mampu berpartisipasi dalam diskusi rasional, saling memberikan alasan, dan mencapai konsensus secara demokratis.

“Rasionalitas komunikatif adalah kemampuan untuk mencapai pemahaman melalui argumen yang bebas dari tekanan dan dominasi, di mana hanya kekuatan argumen terbaik yang berlaku.” (Habermas, 1984)

Dengan demikian, rasionalitas dalam ruang publik menurut Habermas tidak dimonopoli oleh elit intelektual atau teknokrat, tetapi menjadi potensi bersama dalam kehidupan demokratis (Akbar, 2023).

Kedua, Pengaruh Marx dalam pemikiran Habermas terutama terkait dengan analisisnya terhadap masyarakat kapitalis dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Habermas mengadopsi konsep Marx tentang dominasi ekonomi dan mengeksplorasi hubungannya dengan dominasi ideologi dan bentuk-bentuk komunikasi yang terdistorsi. Ketiga, Edmund Husserl dan Fenomenologi: Pemikiran fenomenologi Edmund Husserl, khususnya konsep "intensi hidup" (*lifeworld*), memengaruhi Habermas dalam pengembangan gagasan tentang kolonialisasi dunia kehidupan. Habermas memperluas konsep Husserl tersebut untuk

menggambarkan penindasan dominan oleh logika sistemik dan birokratis dalam kehidupan sosial.

Keempat, yakni teori Kritis Frankfurt, Habermas juga terpengaruh oleh pemikiran dari Teori Kritis Frankfurt, terutama pemikiran Theodor Adorno dan Herbert Marcuse. Dia mengadopsi konsep-konsep seperti kritis terhadap masyarakat industri dan komodifikasi budaya dalam analisisnya tentang masyarakat modern. Sedangkan kelima, yaitu pragmatisme Amerika: Pemikiran pragmatisme Amerika, khususnya karya-karya John Dewey, juga mempengaruhi Habermas. Pragmatisme memberikan kontribusi pada pemikiran Habermas tentang demokrasi deliberatif dan pentingnya komunikasi rasional dalam mencapai kesepahaman. Meskipun ada pengaruh-pengaruh ini, Habermas mengembangkan pemikiran dan teori-teorinya dengan cara yang orisinal dan khas, menciptakan kerangka konseptual yang unik dan inovatif.

Pemikiran Marx yang sudah dikenal oleh Habermas pada Mazhab Frankfurt cukup mempengaruhi pemikiran dia secara utuh. Peranan ia sebagai seorang Marxis tampak ketika ia turut berperan serta dalam gerakan mahasiswa Frankfurt. sekitar tahun 1960-1970 an merupakan periode demonstrasi “gerakan mahasiswa kiri baru yang radikal” yang sedang marak. Sebagai seorang pemikir Marxis, ia cukup dikenal oleh gerakan mahasiswa tersebut, bahkan sempat menjadi ideolognya, walaupun keterlibatannya hanya sejauh sebagai pemikir Marxis. (Akbar, 2023).

Sebagai generasi kedua madzhab Frankfurt, Habermas berupaya mengatasi kebuntuan dan merekonstruksi ulang bangunan pemikiran yang telah dibangun oleh generasi pertamanya. Madzhab ini dikenal dengan teori kritisnya. Teori ini

sebenarnya dirumuskan oleh Horkheimer. Secara sederhana teori ini dapat diartikan sebagai rumusan konsep yang diarahkan untuk menguji kembali konsepsi pengetahuan sosial yang sudah mapan pada waktu itu. Kelompok mapan ini tidak lain adalah aliran positivistik-kapitalistik dengan topangan metode-metode tradisionalnya dan bahkan di dalam kelompok sosialis itu sendiri. Kondisi sosial seperti itu perlu ditelaah kembali karena dalam dataran realitasnya mereka tidak mampu lagi menjawab problem dan tantangan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Untuk menjalankan kembali kemacetan pemikiran dan program tersebut Habermas mencoba berusaha membangun kembali kerangka epistemologi dan metodologis pemikiran para pendahulunya dengan paradigma baru. Paradigma ini dimaksudkan untuk dapat mendapatkan metodologi kritis atas pemikiran pendahulunya (Rizqian, 2023).

Habermas mengemukakan bahwa ruang publik mengalami "privatisasi" seiring dengan berkembangnya kapitalisme dan negara modern. Istilah "privatisasi ruang publik" merujuk pada fenomena di mana banyaknya kepentingan pribadi dan komersial yang mulai mengintervensi ruang-ruang publik mengurangi peranannya dalam pembentukan opini publik yang obyektif dan bebas. Dalam pandangan Habermas, ruang publik yang ideal harusnya bebas dari kepentingan dominan, baik dari kapitalisme maupun negara, agar dapat memberikan ruang bagi pembicaraan yang adil dan rasional (Habermas, 1989).

Meski demikian, Habermas tidak hanya menyoroti masalah di ruang publik fisik, tetapi juga mengembangkan gagasan mengenai komunikasi rasional dalam konteks digital. (Hardiman, 2010) mencatat bahwa dengan berkembangnya

teknologi informasi, ruang publik digital kini menjadi bagian integral dari proses diskursus publik. Internet dan media sosial memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan opini publik. Namun, menurut Hardiman, ruang publik digital juga membawa tantangan baru terkait polarisasi informasi dan disinformasi yang semakin sulit untuk diatasi.

Komunikasi dalam ruang publik harus bersifat rasional dan bebas dari dominasi. Ini berarti bahwa dalam ruang publik yang sehat, setiap individu harus dapat menyampaikan pandangannya berdasarkan alasan yang valid dan tanpa tekanan dari kekuasaan atau kelompok tertentu. Habermas menekankan bahwa untuk menciptakan konsensus dalam masyarakat, diskursus yang rasional dan kritis sangat penting, karena hanya melalui diskusi yang terbuka dan argumentatif kita dapat mencapai kesepakatan yang sah mengenai kepentingan bersama. (Azizah, 2023).

Negara demokrasi seperti Indonesia ini seharusnya tidak melihat bahwa demokrasi hanya sekedar permasalahan pemilu, namun jauh dari itu demokrasi harus dilihat dari prosesnya. Kehidupan sosial masyarakat merupakan proses dari demokrasi yang terjadi seperti halnya komunikasi dalam ruang-ruang dimasyarakat. Jika dilihat dari demokratif bukan hanya soal pemilu melainkan pemilu merupakan hasil dari pemakaian publik atas kedaulatan komunikasi (Yanti, 2022). Menurut Habermas dalam (Hardiman, 2009) kedaulatan komunikasi masyarakat terlaksana di dalam diskusi informal yang dapat dilaksanakan secara inklusif dan memungkinkan menjadi persoalan tema yang relevan. Dalam hal ini ruang publik diharapkan menjadi bentuk ruang untuk membahas opini publik yang

mementingkan kepentingan semua orang tanpa menindas minoritas sebagaimana peran ruang publik.

Pemikiran Jürgen Habermas mengenai ruang publik berakar pada kritiknya terhadap struktur sosial dan politik dalam masyarakat modern. Dalam karyanya yang monumental, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Habermas menganalisis perkembangan ruang publik sejak zaman pencerahan Eropa. Pada periode tersebut, ruang publik dianggap sebagai arena yang terbuka bagi semua warga untuk berdiskusi secara bebas mengenai masalah politik dan sosial tanpa tekanan dari kekuasaan eksternal. (Habermas, 1989) menegaskan bahwa ruang publik pada masa itu memungkinkan pembentukan opini publik yang rasional, yang kemudian dapat memengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah.

Habermas melihat ruang publik pada abad ke-18 sebagai arena interaksi yang memungkinkan masyarakat borjuis untuk bertukar pendapat dan memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam hal ini, ruang publik bukan hanya sekedar tempat berbicara, tetapi juga tempat di mana individu dapat terlibat dalam diskursus kritis yang bertujuan untuk mencapai konsensus yang rasional. Ruang publik ideal, menurut Habermas, harus bebas dari pengaruh ekonomi dan politik, dan hanya dikendalikan oleh diskursus rasional yang berfokus pada kepentingan publik, bukan pribadi (Hardiman, 2010).

Namun, menurut Habermas, pada abad ke-19, dengan kemunculan kapitalisme dan modernisasi negara, ruang publik mengalami transformasi yang signifikan. Media massa yang berkembang pada masa itu mulai berfungsi sebagai saluran utama untuk komunikasi publik. Hal ini menyebabkan terjadinya

komersialisasi ruang publik, di mana media tidak lagi berperan sebagai ruang diskusi rasional, melainkan lebih berfokus pada penyebaran informasi yang lebih mudah diterima dan bersifat menguntungkan secara ekonomi. (Habermas, 1989) mengkritik proses ini, yang menurutnya telah mengurangi kualitas ruang publik sebagai tempat pembentukan opini yang rasional.

Perubahan lainnya yang terjadi pada ruang publik adalah semakin terintegrasinya media dan kekuasaan negara, sehingga menyebabkan terjadinya distorsi dalam diskursus publik. (Hardiman, 2010) menyebutkan bahwa media massa yang dikuasai oleh kepentingan swasta atau negara mulai mendominasi ruang publik, sehingga terjadi ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi. Sebagai akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam diskusi yang bersifat terbuka dan rasional, yang merupakan inti dari fungsi ruang publik dalam demokrasi.

Menurut Habermas, ruang publik dapat diartikan sebagai ruang atau tempat berkumpul kelompok yang membicarakan persoalan publik untuk kepentingan publik (Widodo & Hamdi, 2024). Ruang publik itu sendiri terbuka bagi siapa saja, tidak memusatkan kekuasaan dalam tidak dalam bentuk tatanan yang memecah belah maupun memangkas prinsip-prinsip yang didasari aturan. Ruang publik harus berisikan masyarakat privat itu sendiri (masyarakat sipil), dengan tujuan membentuk opini publik yang bebas dari kontrol pemerintah, membentuk konsensus sosial yang bebas dari sensor dan dominasi. Ruang publik bukan hanya sebagai tempat menurut fungsi utamanya tetapi terdapat fungsi untuk saling komunikasi dan berinteraksi antar masyarakat. Habermas dalam (Hardiman, 2010)

membahas tempat sebagai ruang publik bukan hanya sekedar “tempat fisik” melainkan komunikasi warga itu sendiri yang memproduksi ruang diantara mereka.

Masyarakat dalam kegiatan sosial tentu memiliki interaksi atau komunikasi untuk ikut serta mempengaruhi keputusan terhadap hidupnya. Begitulah komunikasi dijadikan sebagai dasar utama kehidupan warga negara, maka dalam prakteknya sangat dibutuhkan adanya komunikasi para warga negara yang membahas keputusan secara bebas sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang memiliki sistem pemerintahan demokratis rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat harus memiliki ruang bebas dari mobilisasi kekuasaan negara. Menurut Habermas (1993) tersaji dalam karyanya yang berjudul *Faktizitat Und Geltung* dalam (Hardiman, 2010) komunikasi merupakan ciri dasar kehidupan bersama manusia, maka tuntunan teori demokrasi itu tidak lain dari sebuah radikalisasi dari struktur komunikasi yang lama sudah ada dalam negara hukum modern, sehingga negara hukum yang faktual sedikit demi sedikit dapat mendekati asas-asas normatifnya sendiri.

Negara demokrasi seperti Indonesia menyediakan ruang publik sebagai area menanggulangi kebuntuan sistem formal diluar dari kekuasaan administrasi negara. Habermas mengatakan demokrasi hanya akan hidup jika publik dapat dengan bebas mendiskusikan permasalahan mereka dalam ruang-ruang publik (Olivia & Mulyadi, 2022). Ruang publik dijadikan sebagai jaringan komunikasi publik dalam masyarakat sipil. Secara singkat ruang publik dapat diartikan sebagai ruang untuk menyampaikan opini publik, membahas permasalahan negara, maupun permasalahan individu secara bebas dalam penyampaian aspirasi. Contoh ruang

publik antara lain lembaga jurnalisme, media sosial, kedai kopi, dan berbagai tempat berkumpul masyarakat. Berbagai bentuk ruang publik bagi masyarakat hal ini menjadi sarana yang mudah bagi pemimpin negara untuk mengambil kebijakan publik.

Adanya jaminan konstitusional untuk ruang publik juga sangat diperlukan untuk menciptakan adanya demokrasi yang nyata atau istilah politik mewujudkan “*Real Politik*” dengan cara memberikan hak-hak dasar menstrukturasi ruang publik seperti hak kebebasan berserikat dan hak mendirikan perkumpulan dalam masyarakat. Jaminan tercipta ruang publik antara politisi (pemimpin) dengan masyarakat juga harus didukung masyarakat yang kritis serta aktif dalam mengemukakan aspirasi mereka. Habermas kemudian merumuskan model komunikasi kebebasan ruang publik untuk mewujudkan adanya politik yang nyata dalam negara demokrasi yang disebut dengan Demokrasi Deliberatif (*deliberative demokratie*).

Delibertif berasal dari istilah “deliberasi” yang berarti konsultasi atau dalam bahasa politik Indonesia disebut “Musyawarah”. Jurgen Habermas merumuskan model area menanggulangi kebuntuan sistem formal untuk mengetahui opini publik yang memuat kepentingan kaum mayoritas dengan menekankan prosedur komunikatif atau cara berkomunikasi (Yanti, 2022). Menanggulangi kebuntuan sistem formal lebih menekankan pada kondisi dan aturan yang melatar belakangi pengambilan keputusan sehingga masyarakat mampu mematuhi keputusan aturan-aturan itu. Dari pernyataan disimpulkan bahwa area menanggulangi kebuntuan sistem formal mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis

itu sendiri. Segala opini dan aspirasi yang dilontarkan menurut konsep ini harus diuji secara publik sehingga diperoleh alasan dapat diterima secara insubjektif. Model ini lebih menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimitas hukum di dalam sebuah proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural (Hardiman, 2009)

Untuk memahami peran strategis ruang publik dalam masyarakat modern, penting untuk melihat bagaimana Jurgen Habermas memaknai fungsinya dalam proses demokrasi dan pembentukan opini publik. Bagi Habermas, ruang publik tidak hanya merupakan tempat berkumpulnya individu untuk berdiskusi, tetapi juga berfungsi sebagai medium artikulasi kepentingan bersama dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Fungsi-fungsi ini menjadikan ruang publik sebagai elemen krusial dalam menjaga rasionalitas dan legitimasi dalam sistem sosial-politik yang demokratis :

a. Arena diskusi masyarakat

Ruang publik berperan sebagai arena diskusi masyarakat seperti yang dijelaskan Habermas dalam (Hardiman, 2009) bahwa ruang publik politis itu sebagai prosedur komunikasi. Ruang publik kemungkinan digunakan masyarakat untuk secara bebas mengemukakan sikap secara bebas karena ruang publik berperan menciptakan kondisi masyarakat untuk kekuatan berargumen dan mengemukakan opini publik. Tentunya dalam menimbang opini publik penting mengetahui kondisi pengambilan keputusan politis, atau kondisi aturan politis dihasilkan sehingga masyarakat mampu menerima aturan politis itu. Konsep ini menganggap

opini publik mayoritas tidak selalu benar, sehingga model area menanggulangi kebuntuan sistem formal alasan bahwa setiap keputusan harus diuji dan opini mayoritas tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Penerimaan keputusan serta pengakuan dari masyarakat diperoleh dari proses diskusi yang berlangsung dalam ruang publik karna kebijakan tidak langsung dipatuhi oleh masyarakat namun harus didiskusikan terlebih dahulu. Semakin diskutif suatu forum ruang publik maka semakin rasional serta mendapat legitimasi tinggi pula.Namun, kondisi yang sering terjadi isu yang ada dimasyarakat dianggap tidak faktual oleh pemimpin (pembuat kebijakan) sehingga berjalan komunikasi faktual dan terjadi minim legitimasi. Sebagaimana yang ditunjukan oleh Habermas bahwa demokrasi berkembang dari dalam masyarakat itu sendiri dan didorong oleh sistem politik yang sudah ada disana (Hardiman, 2009).

b. Sebagai ruang menyalurkan kedaulatan secara informal

Ruang publik sebagai ruang mmenyalurkan hak komunikatif masyarakat terutama dalam dikurusus informal yang dapat dilaksanakan seacara inklusif dan dapat mempersoalkan segala tema yang relevan dan mungkin. (Hardiman, 2009) masyarakat mampu menyuarakan masalah yang sensitif agar dikelola oleh sistem politik yang sudah ada. Ruang publik dijadikan sebagai arena diskutif masyarakat dengan kondisi komunikasi kelompok bukan institusi maupun organisasi tanpa aturan yang mengikat. Ruang publik mampu sebagai jejaring untuk siapa saja dan dimana saja, artinya ruang publik dapat ditemui dimana saja. Berbagai fungsi bagi

masyarakat ruang publik memiliki ciri perkumpulan seperti keluarga, kelompok informal, organisasi sukarela dst.

c. Sistem Saraf Negara Hukum Demokratis

Ruang publik dapat berfungsi sebagai sarana politik meskipun negara memang sudah dilengkapi dengan institusi resmi yang sah seperti badan parlemen untuk warga negara menyalurkan aspirasi seacara formal dan seacara benar. Sebagai negara memang memiliki sistem administratif yang kuat dan otonom, namun dalam hal ini negara menghasilkan kekuasaanya dari rakyat dan merealisasikan kepada rakyat sehingga penting bagi negara untuk menjadikan ruang publik sebagai sistem syaraf negara hukum demokratis seperti yang digagas oleh Habermas dalam (Hardiman, 2010) bahwa “Rakyat memerintah dirinya sendiri tanpa menyerahkan kekuasaanya kepada instansi lain manapun”. Ruang publik mampu dijadikan sebagai pernanda untuk segala permasalahan yang ditangani negara karna memang institusi formal yang memiliki kewenangan dalam memecahkan masalah secara memuaskan.

Beragam ruang publik dengan sifatnya yang kompleks serta bebas ruang publik diartikan sebagai persaingan kepentingan. Kehidupan masyarakat tentunya memiliki permasalahan yang berbeda sehingga dapat di temui pro dan kontra dalam suatu permasalahan. Habermas tetap menganggap ruang publik mampu menangani segala permasalahan tersebut ia menulis :

“saya akan memperhatikan kemasuk akalan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu masyarakat warga memperoleh perngaruhnya ke dalam

ruang publik, memasukan opini publiknya ke dalam parlemen (dan lembaga perdilan) dan dapat mendesak sistem politik untuk mengubah siklus kekuasaan yang resmi” (Hardiman, 2009).

Dalam mengembangkan konsep ruang publik, Jurgen Habermas menetapkan sejumlah karakteristik mendasar yang menjadi syarat terbentuknya ruang publik ideal. Karakteristik ini menunjukkan bagaimana ruang publik berfungsi sebagai arena diskursif yang terbuka, rasional, dan otonom dalam kehidupan masyarakat. F. Budi Hardiman, sebagai salah satu penafsir Habermas di Indonesia, turut memperjelas dan memperluas pemahaman tentang ciri-ciri ruang publik tersebut. Berikut adalah uraian mengenai ciri-ciri ruang publik menurut Habermas :

1. Akses Terbuka bagi Semua Warga

Ruang publik harus dapat diakses oleh siapa pun, tanpa diskriminasi berdasarkan kelas sosial, status ekonomi, gender, atau latar belakang lainnya. Syarat keterbukaan ini menjamin partisipasi warga negara dalam diskusi bersama.

“Ruang publik adalah sebuah arena diskursif di mana warga negara dapat bertukar pendapat secara bebas dan setara tanpa campur tangan negara atau pasar” (Habermas, 1989: 136).

2. Diskursus Rasional dan Non-Koersif

Diskusi di ruang publik berlangsung secara rasional dan argumentatif, bukan melalui kekerasan, tekanan, atau manipulasi. Tujuannya adalah

mencapai pemahaman bersama (mutual understanding), bukan kemenangan.

"Dalam diskursus publik, kekuatan terbaik adalah argumen rasional, bukan kekuasaan sosial, politik, atau ekonomi." (Hardiman, 2009: 58).

3. Terlepas dari Kekuasaan Negara dan Pasar

Ruang publik ideal menurut Habermas bersifat otonom dari pengaruh institusi negara dan kekuatan ekonomi pasar. Hal ini penting agar opini publik tidak dikoptasi atau dikendalikan oleh kepentingan elite.

"Ruang publik merupakan medan intersubjektif yang otonom, tidak dikendalikan oleh negara maupun kepentingan kapital." (Hardiman, 2009: 59).

4. Fokus pada Kepentingan Umum

Diskursus dalam ruang publik bertujuan membahas isu-isu publik, bukan urusan privat atau kepentingan kelompok tertentu. Ruang publik menjadi tempat artikulasi kebutuhan kolektif masyarakat.

"Diskursus yang berlangsung dalam ruang publik menyangkut persoalan kepentingan umum yang menuntut penyelesaian secara rasional melalui komunikasi."

(Habermas, 1989: 136).

5. Bersifat Kritis dan Reflektif

Ruang publik memungkinkan masyarakat melakukan kritik terhadap kekuasaan, kebijakan publik, dan struktur sosial yang ada. Ia menjadi ruang refleksi bersama terhadap realitas sosial-politik.

"Ruang publik tidak hanya tempat menyampaikan pendapat, tetapi tempat membentuk opini publik yang kritis terhadap kekuasaan." (Hardiman, 2009: 60).

Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai medium yang memungkinkan terbentuknya opini publik yang mencerminkan kehendak masyarakat. Namun, ia juga mengidentifikasi persoalan ruang publik dalam politik sebagai persoalan sistemik yang dapat menghambat terbentuknya ruang publik yang ideal. Menurut Habermas, ruang publik seringkali terganggu oleh dominasi kekuasaan, baik dari negara, ekonomi, atau kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi atau mengendalikan diskursus publik. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam partisipasi masyarakat dan mengurangi kualitas diskursus demokratis (Habermas, 1989).

Salah satu aspek penting dari persoalan ruang publik secara sistemik dalam politik adalah komodifikasi ruang tersebut. Habermas menyatakan bahwa ruang publik dapat dengan mudah terkooptasi oleh kepentingan ekonomi, yang memanipulasi media dan informasi untuk memenuhi agenda tertentu. Media massa, yang seharusnya berfungsi sebagai saluran komunikasi terbuka, seringkali terjebak dalam kepentingan komersial atau politik, yang mengarah pada distorsi informasi dan pembentukan opini publik yang tidak independen. Hal ini menghalangi masyarakat untuk terlibat dalam diskursus politik yang bebas dan inklusif, yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi (Habermas, 1989). Mekanisme ruang publik politik yang ideal harus memastikan bahwa diskursus tetap berlangsung

bebas dari tekanan kekuasaan eksternal, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dari setiap individu dalam pembentukan opini publik.

Ruang publik menurut Habermas adalah ruang deliberatif yang memungkinkan individu untuk mengemukakan pendapat mereka dan berdebat secara rasional. Habermas menegaskan bahwa agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik, ruang publik harus menyediakan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berpartisipasi tanpa dominasi dari kekuasaan luar. Diskursus yang adil dan terbuka, di mana setiap individu dapat mengakses informasi yang transparan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mencerminkan kehendak bersama masyarakat (Habermas, 1989). Dalam mekanisme ini, pertukaran ide dan argumen menjadi hal yang esensial, dan penting bagi ruang publik untuk tetap bebas dari intervensi pihak-pihak yang dapat merusak kualitas diskursus tersebut. Hanya melalui ruang publik yang setara dan terbuka, mekanisme politik dapat mencapai konsensus sosial yang berkeadilan.

2.2. Asosiasi Sebagai Civil Society

Civil society atau masyarakat sipil merujuk pada ruang sosial yang terletak di antara negara, pasar, dan keluarga, yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dan berasosiasi di luar kontrol otoritas negara atau kekuatan ekonomi. Dalam pengertian ini, civil society mencakup organisasi dan komunitas yang dibentuk oleh warga negara secara sukarela, dengan tujuan untuk mengadvokasi hak, kebebasan, serta kepentingan mereka. Sebagai ruang publik yang terbuka, masyarakat sipil memungkinkan diskursus bebas, partisipasi politik, dan

pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Organisasi-organisasi dalam civil society seperti lembaga non-pemerintah (NGO), serikat pekerja, kelompok keagamaan, serta komunitas budaya dan pendidikan, memainkan peran penting dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial (Hidayat, 2023).

Civil society juga berfungsi sebagai ruang pembentukan opini publik yang otonom, di mana berbagai kelompok dapat saling berdialog, berbagi pandangan, dan mengorganisir diri untuk menyuarakan aspirasi kolektif mereka. Dalam banyak hal, masyarakat sipil dianggap sebagai penjaga penting demokrasi, karena fungsinya yang mengawasi kekuasaan negara, mengartikulasikan kepentingan masyarakat, dan menciptakan ruang untuk pluralisme dalam suatu negara (Utami, 2021).

Jean L. Cohen merupakan salah satu pemikir kontemporer yang banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori *civil society*, khususnya dalam kaitannya dengan demokrasi modern dan tatanan sosial-politik liberal. Dalam karyanya bersama Andrew Arato yang berjudul *Civil Society and Political Theory* (1992), Cohen mendefinisikan *civil society* sebagai ruang sosial yang relatif otonom dari negara dan ekonomi, yang mencakup jaringan institusi dan asosiasi sosial seperti keluarga, organisasi sukarela, komunitas, media independen, serta lembaga-lembaga budaya dan pendidikan. Ruang ini tidak semata-mata berada dalam ranah privat, namun juga tidak tunduk pada kendali langsung negara atau kepentingan pasar (Rahmayanti et al. 2022).

Dalam teori *civil society* yang dikemukakan oleh Jean L. Cohen, asosiasi memegang peranan yang sangat penting sebagai aktor utama dalam ruang masyarakat sipil. Cohen memandang asosiasi baik yang bersifat formal maupun informal sebagai medium utama bagi warga negara untuk mengekspresikan identitas, nilai, dan kepentingan mereka secara kolektif di luar kendali negara dan pasar. Asosiasi ini meliputi berbagai bentuk organisasi seperti kelompok komunitas, organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga keagamaan, kelompok seni dan budaya, serikat pekerja, serta forum-forum diskusi publik (Putra & Sihidi, 2022).

Aktor-aktor asosiasional ini, menurut Cohen, merupakan elemen penggerak dalam demokrasi deliberatif. Mereka menjadi saluran aspirasi warga dan tempat berlangsungnya proses diskusi, kritik, dan pembentukan opini publik yang otonom. Dalam masyarakat yang demokratis, asosiasi berfungsi sebagai pelindung terhadap dominasi negara dan kekuatan pasar yang cenderung memusatkan kekuasaan. Oleh karena itu, Cohen menempatkan asosiasi pada posisi strategis sebagai penjaga pluralisme dan perwujudan partisipasi politik non-elektoral (Putra & Sihidi, 2022)

Cohen menolak anggapan bahwa asosiasi masyarakat sipil hanya bersifat pasif sebagai penyalur bantuan sosial atau sebagai mitra negara dalam pembangunan. Sebaliknya, ia melihat asosiasi sebagai entitas yang memiliki kekuatan normatif dan politis untuk mengartikulasikan visi masyarakat alternatif. Dalam ruang *civil society*, asosiasi menjadi agen transformasi sosial yang mampu menciptakan wacana tandingan, menyuarakan kelompok-kelompok yang

terpinggirkan, serta menantang struktur ketidakadilan yang diproduksi oleh negara maupun pasar (Hidayat, 2023).

Dalam pandangan Cohen, keberadaan asosiasi yang kuat dan beragam merupakan indikator dari masyarakat sipil yang sehat. Ia menekankan pentingnya kondisi institusional yang mendukung tumbuhnya asosiasi secara bebas dan mandiri. Ini mencakup jaminan atas kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil warga negara. Tanpa prasyarat ini, asosiasi akan sulit berfungsi secara efektif sebagai bagian dari *civil society* yang kritis dan reflektif (Sukma, 2021).

Dalam kerangka ini, Cohen melihat asosiasi bukan hanya sebagai perantara antara individu dan negara, tetapi juga sebagai wadah bagi pembangunan identitas kolektif dan solidaritas sosial. Ia menekankan bahwa solidaritas yang dibangun melalui asosiasi bersifat reflektif dan terbuka terhadap keberagaman, bukan eksklusif atau totalitarien. Hal ini penting agar *civil society* tetap menjadi arena inklusif yang mampu merespons perubahan sosial secara adil dan demokratis (Aryanto, 2020).

Komunitas berperan sebagai salah satu bentuk asosiasi dalam masyarakat sipil yang menjalankan tiga fungsi utama yaitu, ekspresi kepentingan warga, forum deliberatif, dan pembentuk solidaritas. Dalam komunitas, individu tidak hanya menjadi anggota pasif, melainkan turut serta dalam proses pembentukan makna kolektif, pengambilan keputusan, serta aksi sosial. Oleh karena itu, komunitas tidak

sekadar menjadi jaringan sosial, tetapi juga arena produksi wacana sosial dan kultural yang mandiri (Aryanto, 2020).

Fungsi deliberatif komunitas juga tidak bisa diabaikan. Komunitas menyediakan ruang diskursif alternatif di mana warga dapat saling berdialog, menegosiasikan nilai, serta merumuskan agenda kolektif. Berbeda dengan ruang politik formal yang sering elitis dan tersegmentasi, komunitas justru cenderung lebih inklusif dan fleksibel, memungkinkan partisipasi langsung dari anggotanya. Dalam pandangan Cohen, kapasitas komunitas untuk menciptakan ruang deliberasi semacam ini menjadi fondasi penting bagi demokrasi yang partisipatif dan reflektif (Sukma, 2021).

Selain itu, komunitas sebagai bagian dari civil society juga berperan dalam membentuk solidaritas sosial yang berbasis pada nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian. Solidaritas ini bukan hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal, karena komunitas seringkali terlibat dalam kegiatan sosial yang menjangkau wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini, komunitas tidak hanya memperkuat kohesi internal anggotanya, tetapi juga mendorong pembangunan sosial berbasis lokal yang bersifat inklusif (Yuliani, 2025).

Dengan subjek penelitian yang diteliti yaitu komunitas galeri jalanan, dalam mendorong pembangunan sosial, aktivitas dari komunitas Galeri Jalanan juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial, politik dan budaya yang ada di sekitar sekaligus memperkaya keberagaman pemikiran di Kota Tasikmalaya. Komunitas Galeri Jalanan yang

dibentuk sejak tahun 2016 ini memiliki serangkaian kegiatan rutin yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi sosial, meningkatkan literasi, serta memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat Kota Tasikmalaya. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mencakup diskusi intelektual, tetapi juga acara yang bersifat hiburan dan sosial yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Beberapa kegiatan rutin yang menjadi bagian dari aktivitas komunitas Galeri Jalanan meliputi lapak buku, diskusi publik, mimbar bebas, nonton bareng film, bakti sosial dan penyebaran opini publik.

Dengan demikian, konsep asosiasi dalam *civil society* menurut Jean L. Cohen menekankan pada tiga fungsi utama, pertama, sebagai kanal ekspresi dan artikulasi kepentingan warga negara; kedua, sebagai arena deliberasi dan kritik terhadap kekuasaan negara dan pasar; dan ketiga, sebagai sarana pembentukan solidaritas sosial yang inklusif. Melalui ketiga peran ini, asosiasi menjadi komponen vital dalam menjaga dinamika demokrasi dan keberlanjutan masyarakat sipil yang sehat.

2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, ini penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan bahan referensi serta perbandingan dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis baik secara teori maupun konseptual. Penelitian-penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk mengoreksi, melengkapi dan mendukung penelitian penulis mengenai konsep ruang publik yang belum diteliti sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Aspek Penelitian	Keterangan
1.	Penulis	Septevan Nanda Yudisman (Tahun 2020)
	Judul Penelitian (skripsi)	Analisis Peran Perpustakaan Umum Sebagai Ruang Publik Dari Perspektif Teori Sosial Public Sphere Jurgen Habermas.
	Latar Belakang	Defenisi ruang publik yang dikemukakan oleh jurgen habermas bahwa ruang publik merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan ini relevan dengan peran perpustakaan sebagai media komunikasi antara pengarang melalui buku atau hasil tulisannya dengan pembaca yang bertujuan mendapatkan informasi atau juga atau juga antara pembaca dengan pembaca dalam mendiskusikan tentang sebuah buku yang terbitkan. Dengan kata lain perpustakaan merupakan salah satu media komunikasi sebagaimana yang diungkapkan Habermas mengenai Ruang publik.
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.

	Hasil Penelitian	Ruang publik dipahami sebagai wahana perjuangan kaum borjuis melawan otoritas penguasa. Ini identik dengan perpustakaan sebagai wahana perjuangan melawan kebodohan dan perannya dalam pencerahan masyarakat, penyebaran keadilan dan kebenaran
	Perbedaan	Penelitian terdahulu lebih spesifik menganalisis peran perpustakaan umum yang menurut Badan Standarisasi Nasional perpustakaan umum adalah perpustakaan yang kegiatannya diselenggarkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kotamadya yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan diwilayah kabupaten atau kotamadya serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. Sedangkan dalam penelitian yang akan datang berfokus pada komunitas yang tidak dinaungi oleh pemerintah daerah.
2.	Penulis	Sandriani, Salmanissa Trishagita, dan Wiman Rizkidarajat (Tahun 2025)
	Judul Penelitian	Peran Komunitas Seni Mural Soloissolo dalam Pembentukan Ruang Publik di Surakarta

	Latar Belakang	Penelitian ini berangkat dari fenomena seni mural sebagai bentuk seni jalanan yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika kota, tetapi juga sebagai media komunikasi sosial yang efektif. Komunitas Soloissolo di Surakarta dianggap memiliki peran penting dalam menciptakan ruang publik baru melalui karya mural mereka. Mural yang dihasilkan tidak hanya memperindah ruang perkotaan, tetapi juga menciptakan pemaknaan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana komunitas seni Soloissolo berkontribusi dalam pembentukan ruang publik di Kota Surakarta.
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota komunitas Soloissolo dan masyarakat sekitar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran komunitas seni mural dalam pembentukan ruang publik.
	Hasil Penelitian	Penelitian ini mengungkapkan bahwa mural tidak hanya digunakan untuk menambah nilai estetika,

		tetapi juga sebagai media komunikasi yang mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, mural juga digunakan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali ruang publik yang mungkin telah terabaikan. Hasil penelitian ini memberikan kebaruan bahwa seni publik, khususnya seni mural, dapat menjadi upaya untuk revitalisasi suatu kawasan yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang luas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
	Perbedaan	Perbedaan utama terletak pada jenis komunitas yang diteliti. Penulis lebih fokus pada kegiatan komunitas galeri jalanan secara umum, sementara penelitian terdahulu lebih spesifik pada komunitas seni mural Soloissolo.
3.	Penulis	Sunartiningsih, Agnes, Alfian Fikri, Surya Putra, and Agnes Sunartiningsih (Tahun 2024)
	Judul Penelitian	Fenomena Kelompok Simpatisan Partai Persatuan Pembangunan Di Sleman Dalam Perspektif Ruang Publik.
	Latar Belakang	Penelitian ini berfokus pada fenomena keterlibatan kelompok simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Sleman dalam

		Pemilu 2019. Kelompok-kelompok ini, yang terdiri dari simpatisan dan organisasi sayap partai, sering terlibat dalam dinamika sosial-politik yang kompleks.
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menemukan bahwa kelompok simpatisan PPP di Sleman berperan aktif dalam pembentukan ruang publik melalui berbagai aksi yang mereka lakukan. Mereka sering terlibat dalam kegiatan yang menampilkan simbol-simbol kekuatan dan identitas partai, seperti konvoi dan pemasangan atribut. Aksi-aksi ini tidak hanya memperkuat eksistensi partai di ruang publik, tetapi juga menciptakan ruang-ruang baru yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial kelompok tersebut.
	Perbedaan	Perbedaan utama terletak pada jenis komunitas yang diteliti. Penulis lebih fokus pada kegiatan komunitas galeri jalanan secara umum, sementara penelitian terdahulu lebih spesifik pada kelompok simpatisan Partai Politik.
4.	Penulis	Muhammad Amin Susilo (Tahun 2020)

	Judul Penelitian	Analisis Konsep Ruang Publik Jurgen Habermas (Studi Kasus Komunitas Kalimetro Kota Malang)
	Latar Belakang	Dilatar belakangi oleh kebutuhan informatif yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui Komunitas Kalimetro sebagai lokus penelitian, usaha yang dilakukan yakni menggali sertamerefleksi kejadian yang terjadi di Komunitas Kalimetro dengan menggunakan perspektif ruang publik Jurgen Habermas
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.
	Hasil Penelitian	Adanya kebebasan pembentukan wacana, adanya kesejajaran aktor yang berperan, yang akhirnya membentuk agenda-agenda publik seperti diskusi publik yang berkaitan dengan issue sosial, budaya dan politik yang berada di sekitar masyarakat yang telah membentuk relasi dan nilai. Sehingga Komunitas Kalimetro dijadikan tempat yang cocok untuk melakukan pembahasan kepublikan tersebut. Potensi kepublikan yang berada di Komunitas Kalimetro tersebut dapat menjadi pencerahan kepada masyarakat khususnya di Kota Malang untuk dijadikan fasilitas bersama dalam membuka

		ruang diskursus untuk membentuk kesepahaman atas persoalan yang merugikan publik.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu lebih spesifik menganalisis konsep ruang publik untuk membentuk kesepahaman atas persoalan yang merugikan publik, sedangkan dalam penelitian yang akan datang berfokus pada bagaimana nilai-nilai ruang publik menurut jurgen habermas pada aktivitas diskusi publik pembahasan mengenai isu nasional seperti RUU TNI di komunitas galeri jalanan.
5.	Penulis	Finish Rimbi Kawindra (Tahun 2024)
	Judul Penelitian	Wedhang Cor di JTV Jember Menurut Perspektif Habermas (Analisis Wacana Kritis pada Acara Wedhang Cor di JTV Jember dalam Konsep Ruang Publik Habermas)
	Latar Belakang	Konsep ruang publik yang akan diteliti berdasarkan pada beberapa contoh episode yang ada pada acara <i>Wedhang Cor</i> . Dari tayangan tersebut juga dilihat beberapa aspek yang muncul diantaranya konten acara, keikutsertaan penonton pada acara tersebut dan aspek lain yang menunjang acara tersebut.

	Metode Penelitian	Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan menggunakan teknik <i>critical discourse analysis</i> yang diungkapkan oleh Fairclough yang terdiri dari teks, praktik wacana dan praktik sosiokultural.
	Hasil Penelitian	Ruang publik yang terbentuk pada acara <i>Wedhang Cor</i> masih bersifat utopia. Hal ini digambarkan dengan masih adanya pengaruh dari luar atau kelompok – kelompok tertentu dalam penentuan topik atau materi yang akan dibahas dalam acara <i>Wedhang Cor</i> sehingga menimbulkan adanya acara ‘titipan’. Munculnya acara ‘titipan’ pada tayangan <i>Wedhang Cor</i> ini dapat digambarkan bahwa media sebagai penyedia informasi pun tidak akan bisa luput dari pengaruh luar. Hal ini menyiratkan bahwa secara tidak langsung media dijadikan sebuah tempat atau lahan untuk alat politik bagi yang berkepentingan. <i>Wedhang Cor</i> mampu untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan pertanyaan, argumen, ide dan gagasan pada topik atau permasalahan yang sedang di bahas. Masyarakat mendapatkan porsi yang sama dalam menuangkan

		argumen mereka. Keberagaman karakteristik dari masing – masing penonton yang ikut serta dalam proses diskusi ini mampu mewakili keseimbangan ruang publik Habermas.
	Perbedaan	Pada penelitian terdahulu menganalisis dengan menggunakan teknik <i>critical discourse analysis</i> yang diungkapkan oleh Fairclough yang terdiri dari teks, praktik wacana dan praktik sosiokultural. Sedangkan penelitian yang akan datang menganalisis dengan metode studi kasus yang relevan dalam menganalisis pengalaman subjektif individu, dalam hal ini yaitu pengalaman individu yang terlibat dalam komunitas galeri jalanan.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari fenomena tumbuhnya komunitas galeri jalanan, yaitu sekelompok masyarakat yang secara mandiri mengorganisasi aktivitas-aktivitas kultural dan sosial di ruang terbuka (jalan, taman kota, trotoar) dengan tujuan menyebarkan gagasan, menyuarakan kritik sosial, dan menciptakan ruang interaksi publik. Komunitas ini tidak hanya menempati ruang fisik, tetapi juga memproduksi makna dan ruang simbolik melalui beragam kegiatan partisipatif.

Untuk memahami posisi komunitas ini dalam struktur masyarakat, digunakan konsep asosiasi masyarakat sipil (civil society) dari Jean L. Cohen. Menurut Cohen, civil society adalah arena interaksi sosial yang berada di luar negara dan pasar, tempat individu dan kelompok berkumpul secara sukarela untuk membentuk opini, memperjuangkan kepentingan bersama, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Komunitas galeri jalanan dapat dipandang sebagai bentuk praksis masyarakat sipil yang berupaya merebut ruang dan peran dalam kehidupan sosial-politik melalui ekspresi. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan komunitas ini mencerminkan fungsi kritis dan komunikatif masyarakat sipil, antara lain:

1. Lapak buku murah/gratis
2. Mimbar bebas
3. Diskusi publik
4. Nonton Bareng Film

5. Aksi bakti sosial
6. Penyebaran opini dan propaganda melalui media.

Kerangka ini kemudian dihubungkan dengan konsep ruang publik dari Jürgen Habermas sebagai alat analisa, yang menggambarkan ruang publik sebagai tempat terjadinya pertukaran gagasan rasional antar warga negara yang bebas dari dominasi negara dan pasar. Dalam ruang ini, masyarakat dapat berargumentasi, membentuk opini publik, dan mempengaruhi keputusan politik. Sehingga dapat mengetahui komunitas galeri jalanan, melalui aktivitasnya merepresentasikan bentuk ruang publik alternatif yang tumbuh dari bawah (*bottom-up*), memperluas cakupan demokrasi dan artikulasi suara publik yang seringkali terpinggirkan.